

Implementation of The 'Berkat Sayang' Program For Vulnerable Groups in Sidoarjo Regency

[Implementasi Program 'Berkat Sayang' untuk Kelompok Rentan di Kabupaten Sidoarjo]

Marcella Riski Zaliany¹⁾, Hendra Sukmana²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract.. This study aims to determine how the Berkat Sayang Program implemented by the Sidoarjo Social Service in addressing hunger suffered by vulnerable groups in Sidoarjo Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation, and documentation. Informants consisted of the Head of Personnel Subdivision of the Sidoarjo Social Service, Social Service staff, catering parties, and elderly beneficiaries directly involved in the program implementation. The results of the study indicate that the implementation of the Berkat Sayang Program is in accordance with the indicators of Edward III's theory and provides real benefits for the welfare of neglected elderly. The communication aspect has been running clearly through coordination and socialization meetings between the Social Service with TKSK and beneficiaries. In terms of resources, this program is supported by cross-sector human resources and continuously increasing APBD funding. The disposition of the implementers shows a high commitment with the innovation of geotagging applications to increase the accuracy of aid delivery by catering providers, although distribution is sometimes hampered by weather. The bureaucratic structure has been organized through SOPs and a digital reporting system so that implementation is systematic and accountable. However, bureaucratic obstacles arise in changing the names of deceased recipients, because they have to wait for the Regent's Decree for the following fiscal year, thus reducing bureaucratic flexibility. The novelty of this study lies in the application of George C. Edward III's implementation theory specifically to examine the Berkat Sayang program in Sidoarjo with a focus on communication indicators, resources, disposition, and bureaucratic structure in social policies for vulnerable groups.

Keywords - Implementation, Program, Vulnerable Groups

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Berkat Sayang yang diterapkan oleh Dinas Sosial Sidoarjo dalam mengatasi kelaparan yang diderita oleh kelompok rentan di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Kasubbag Kepegawaian Dinsos Sidoarjo, staf Dinsos, pihak catering, dan lansia penerima manfaat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Berkat Sayang telah sesuai dengan indikator teori Edward III dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan lansia terlantar. Aspek komunikasi sudah berjalan jelas melalui koordinasi dan pertemuan sosialisasi Dinas Sosial dengan TKSK berserta penerima manfaat, Dari sisi sumber daya, program ini ditopang SDM lintas sektor dan pembiayaan APBD yang terus meningkat. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi dengan inovasi aplikasi geotag untuk menambahkan akurasi pengiriman bantuan oleh penyedia catering, walau distribusi kadang terhambat cuaca. Adapun struktur birokrasi telah tertata melalui SOP dan sistem pelaporan digital sehingga implementasi berlangsung sistematis dan akuntabel. Namun, hambatan birokrasi muncul pada penggantian nama penerima yang meninggal, karena harus menunggu Surat Keputusan Bupati tahun anggaran berikutnya, sehingga mengurangi fleksibilitas birokrasi. Kuterbarukan dari penelitian ini terletak pada penerapan teori implementasi George C. Edward III secara spesifik untuk mengkaji program Berkat Sayang di Sidoarjo dengan fokus pada indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam kebijakan sosial bagi kelompok rentan.

Kata Kunci - Implementasi, Program, Kelompok Rentan

I. PENDAHULUAN

Konteks kebijakan sosial menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat prasejahtera kerap mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan [1]. Sahadi Humaedi [2] menyebut kelompok ini sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus demi peningkatan kualitas hidup mereka. Kondisi ekonomi yang lemah, minimnya dukungan keluarga, serta keterbatasan akses membuat banyak lansia hidup dalam keterlantaran, kekurangan gizi, bahkan kelaparan, khususnya di kawasan padat penduduk dan wilayah pinggiran[3]. Fenomena ini menunjukkan masih adanya ketimpangan sosial, seperti yang tampak di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meluncurkan Program Berkat Sayang sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan lansia.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Sebelum hadirnya Program Berkas Sayang, kondisi lansia miskin dan terlantar di Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan yang cukup serius, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan perhatian sosial. Banyak dari mereka hidup sebatang kara tanpa pendamping keluarga, menetap di kawasan padat atau wilayah pinggiran dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Akses terhadap makanan bergizi sangat terbatas, dan mereka kerap luput dari program bantuan reguler karena pendataan yang belum menyentuh kelompok paling marginal[4]. Tak jarang, kelangsungan hidup mereka bergantung pada belas kasih tetangga atau bantuan insidental dari pihak nonformal yang tidak berkelanjutan. Situasi ini bukan hanya memperburuk kesehatan fisik lansia, tetapi juga melemahkan perlindungan sosial mereka sebagai warga negara.

Tanggung jawab negara terhadap fakir miskin merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial [5]. Perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi bagian dari kebijakan yang berpihak pada hak-hak dasar setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” [5]Program Berkas Sayang menjadi implementasi konkret dari amanat konstitusi tersebut, dengan tujuan memberikan jaminan sosial yang berkelanjutan bagi lansia dan warga miskin.

Landasan hukum pelaksanaan program ini juga diperkuat oleh kebijakan nasional di bidang kesejahteraan sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin[6] yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan. Secara teknis, pelaksanaan bantuan sosial bagi lansia mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 [7]dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 [8]yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk per makanan, merupakan bagian dari pelayanan sosial bagi lansia terlantar.

Pada tingkat daerah, dasar hukum program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/25/438.1.1.3/2025 tentang penetapan penerima dan besaran bantuan makanan gratis tahun anggaran 2025. Selain itu, Program Berkas Sayang juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2024 sebagai bagian dari program prioritas dalam RPJMD 2021–2026[9]. Dengan landasan hukum yang komprehensif mulai dari tingkat nasional hingga daerah, program ini dirancang agar bantuan yang diberikan bersifat tepat sasaran, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Program Berkas Sayang merupakan bantuan per makanan gratis yang secara khusus menyasar lansia terlantar dan tidak memiliki penghasilan di Kabupaten Sidoarjo. Diluncurkan pada 1 September 2022, program ini awalnya mencakup 730 penerima manfaat, dan terus meningkatkan penerima pada tahun 2025. Data penerima dikumpulkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bersama pihak kecamatan, kemudian diverifikasi dan diseleksi kelayakannya oleh Dinas Sosial. Setiap penerima berhak mendapatkan dua kotak makanan sehat per hari, masing-masing senilai Rp15.000, yang dikirim langsung ke rumah mereka pada dua sesi: pagi (pukul 07.00–10.00) dan sore (pukul 15.00–17.00) tanpa antrean dan tanpa keharusan hadir di titik kumpul pelayanan Balai desa. Pelaksanaan program diawasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan TKSK dan penyedia catering lokal, dengan pengawasan gizi dari Dinas Kesehatan untuk memastikan kualitas menu makanan yang layak konsumsi.

Lebih dari sekadar bantuan konsumtif, Berkas Sayang membawa dampak sosial dan ekonomi yang luas. Secara sosial, program ini menjadi jembatan dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan, khususnya lansia yang kerap terabaikan dalam skema bantuan konvensional [10]. Dengan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi, kesehatan dan daya tahan lansia miskin diharapkan dapat meningkat, sehingga mendorong kehidupan yang lebih layak [11].

Tabel 1 Jumlah Penerima dan Sebaran Program Berkas Sayang di Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Jumlah Penerima	Jumlah Sebaran Penerima
2022	730	18 Kecamatan
2023	730	18 Kecamatan
2024	800	18 Kecamatan
2025	800	18 Kecamatan

Sumber diolah dari Dinas Sosial Sidoarjo (Tahun 2025)

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa sejak pertama kali diluncurkan ada tahun 2022, program ini telah menjangkau seluruh 18 kecamatan di Kabupaten (Sidoarjo Balongbendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Krembong, Krian, Porong, Prambon, Sedati, Sidoarjo, Sukudono, Taman, Tarik, Tanggulangin, Waru, Wonoayu) tanpa terkecuali. Jumlah penerima manfaat tercatat stabil di angka 730 pada dua tahun pertama, lalu meningkat menjadi 800 orang pada tahun 2024 dan 2025. Kenaikan jumlah penerima ini menunjukkan adanya evaluasi dan penyesuaian program agar bisa mencakup lebih banyak lansia yang membutuhkan. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam merespons kebutuhan sosial secara langsung, tetapi juga menjadi langkah

nyata meningkatkan kesejahteraan kelompok marginal. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai distribusi penerima manfaat di tingkat wilayah, sebaran jumlah penerima Program Berkas Sayang di masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Sebaran Jumlah Penerima Program Berkas Sayang di Setiap Kecamatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Jumlah Penerima
1	Balombendo	44 Individu
2	Buduran	48 Individu
3	Candi	49 Individu
4	Gedangan	52 Individu
5	Jabon	45 Individu
6	Krebung	45 Individu
7	Krian	45 Individu
8	Porong	49 Individu
9	Prambon	45 Individu
10	Sedati	35 Individu
11	Sidoarjo	34 Individu
12	Sukodono	39 Individu
13	Taman	45 Individu
14	Tarik	45 Individu
15	Tanggulain	45 Individu
16	Tulangan	45 Individu
17	Waru	45 Individu
18	Wonoayu	45 Individu
	Total	800 Individu

Sumber : Data diolah dari Dinas Sosial Sidoarjo (Tahun 2025)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sebaran penerima Program Berkas Sayang di setiap kecamatan relatif merata dengan jumlah yang tidak berbeda secara signifikan. Kecamatan Gedangan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penerima tertinggi yaitu 52 orang, diikuti oleh Kecamatan Candi dan Porong masing-masing sebanyak 49 orang, serta Buduran sebanyak 48 orang. Sementara itu, sebagian besar kecamatan lainnya memiliki jumlah penerima yang cenderung sama, yaitu sekitar 45 orang. Di sisi lain, terdapat beberapa kecamatan dengan jumlah penerima yang lebih rendah, seperti Kecamatan Sidoarjo sebanyak 34 orang, Sedati 35 orang, dan Sukodono 39 orang. Perbedaan jumlah ini menunjukkan adanya variasi kebutuhan penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Kondisi sebaran yang relatif stabil dan merata ini diduga dipengaruhi oleh mekanisme penetapan kuota penerima yang telah ditentukan secara proporsional oleh pemerintah daerah berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat kerentanan sosial di setiap kecamatan. Selain itu, penggunaan basis data terpadu kesejahteraan sosial sebagai acuan dalam penentuan penerima juga berkontribusi terhadap konsistensi jumlah penerima dari tahun ke tahun. Dengan demikian, pola distribusi yang cenderung tetap ini mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga pemerataan bantuan sekaligus memastikan bahwa program dapat menjangkau kelompok sasaran secara adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji penelitian mengenai implementasi Program Berkas Sayang untuk kelompok rentan di Sidoarjo. Penelitian oleh Syarifah Nikmah dan Tjitjik Rahaju (2021)[12] dengan judul "*Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Pemakanan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Surabaya*"[12] menunjukkan bahwa program pemakanan yang menyoar lansia, penyandang disabilitas, serta anak yatim/piatu telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan adanya kendala dalam aspek ketepatan distribusi dan kualitas makanan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan khusus penerima. Selain itu, keterlibatan kelompok masyarakat seperti karang Werda dan IPSM dinilai memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Selanjutnya, penelitian dari Shafa Rizqi Nabilah (2024)[13] dengan judul "*The Accuracy of "Berkas Sayang: Aid in Poverty Alleviation in Sidoarjo District"*"[13] menganalisis ketepatan Program Berkas Sayang di Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mengurangi kemiskinan melalui bantuan pangan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut telah memberikan manfaat bagi penerima, namun masih terdapat sejumlah kendala, terutama pada aspek sosialisasi, pemahaman masyarakat, kualitas makanan, serta distribusi bantuan yang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana. Penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi secara berkala oleh

Dinas Sosial serta peningkatan sosialisasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Novia Megasari dan Hendra Sukmana (2023) [14] dengan judul *“Implementasi Kebijakan BUMDes dalam Mengembangkan Agrowisata Belimbing Desa Watesari Balongbendo Sidoarjo”* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BUMDes Bina Sejahtera telah berjalan cukup baik berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan kebijakan, meskipun masih ditemukan kekurangan pada penerapan SOP yang belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Program Berkat Sayang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Permasalahan tersebut meliputi aspek sosialisasi program dan tata kelola administrasi. Pertama, sosialisasi program kepada masyarakat masih belum berjalan secara optimal, khususnya terkait kriteria penerima manfaat dan prosedur pendaftaran. Kondisi ini menyebabkan sebagian calon penerima manfaat belum memahami mekanisme program, sehingga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan meskipun telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kedua, terdapat kendala dalam tata kelola birokrasi yang cenderung berbelit, terutama dalam proses penggantian penerima manfaat ketika terjadi kondisi tertentu seperti meninggal dunia. Proses penggantian tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui mekanisme pengajuan dan penetapan melalui surat keputusan bupati terbaru. Ketentuan ini menyebabkan proses administrasi menjadi lebih panjang, karena tidak cukup hanya didasarkan pada berita acara dari tingkat desa.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan Program “Berkat Sayang” dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III [15]. Teori ini dipilih karena dinilai sesuai untuk menganalisis keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan melalui empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berperan penting dalam memastikan informasi dan tujuan kebijakan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat [16]. Selain itu, ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program. Disposisi pelaksana juga mempengaruhi keberhasilan implementasi karena berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesiapan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi yang jelas dan terorganisasi dapat mendukung koordinasi antarbagian sehingga pelaksanaan program berjalan lebih efektif [15]. Melalui keempat aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Berkat Sayang di Kabupaten Sidoarjo serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya di lapangan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait implementasi kebijakan “Berkat Sayang” di Kabupaten Sidoarjo, khususnya dari perspektif pelaksana dan penerima manfaat [17].

Lokasi penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi utama pelaksana program, serta mencakup lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak perumus kebijakan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua institusi tersebut memiliki peran strategis dalam proses perencanaan dan implementasi program, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan kontekstual.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai mampu memberikan data serta informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian [18]-[19]. Informan yang terlibat dalam penelitian ini antara lain Kasubbag Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, staf Dinas Sosial Sidoarjo, pihak penyedia jasa katering, serta masyarakat penerima manfaat Program Berkat Sayang. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan dan peran langsung mereka dalam pelaksanaan program, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh terkait implementasi kebijakan yang diteliti.

Penelitian ini berfokus pada indikator implementasi kebijakan menurut teori George C. Edwards III yang terdiri dari empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi [15]. Keempat variabel tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor terhadap keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan Program Berkat Sayang di lapangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara secara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman (1984) yang terdiri atas empat tahap, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan [20]. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memusatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel agar lebih mudah

dipahami[20]. Adapun proses penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi hasil penelitian dengan memperhatikan kondisi dan konteks yang ditemukan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Program “Berkat Sayang” serta bagaimana program tersebut diimplementasikan di lapangan dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan. Dalam mengukur keberhasilan implementasi program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Teori tersebut digunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program melalui empat indikator utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi [15][21]. Adapun penjelasan mengenai keempat indikator tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam konteks implementasi kebijakan karena berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Menurut George C. Edward III Kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program[15]. Jika informasi tidak tersampaikan dengan baik, dapat terjadi kesalahan pemahaman yang berdampak pada kegagalan pencapaian tujuan kebijakan [22]. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif diperlukan agar seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawabnya. Berikut informasi hasil wawancara bersama staf Dinas Sosial Sidoarjo, salah satu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Berkat Sayang untuk kelompok rentan di Sidoarjo:

”Komunikasi itu jadi ujung tombak ya mbak. Karena program ini kan menasar ke kelompok rentan seperti lansia, maka informasi yang kami sampaikan ke bawah harus benar-benar jelas. Alhamdulillah, kami sudah membangun sistem komunikasi yang cukup solid, terutama lewat koordinasi pertemuan intensif dengan pihak kelurahan dan TKSK di masing-masing kecamatan mengenai tujuan program ini yaitu untuk membantu para lansia yang terlantar di Sidoarjo dengan memenuhi kebutuhan makanan mereka. Tapi memang, ditahap awal-awal itu sempat ada kendala karena penyesuaian teknis, tapi sekarang alurnya jauh lebih terstruktur dan cepat.” (Wawancara 18 Februari 2025)

“Kami selalu berbenah mbak berdasarkan evaluasi tiap pertemuan, kita pastikan semua data dan arahan untuk materi sosialisasi yang kami berikan ke kelurahan dan TKSK itu sudah jelas dan seragam. Sosialisasi kami bersifat dua, sosialisasi informasi untuk tim pelaksana dan informasi untuk publik. Untuk materi yang bersifat teknis seperti kriteria calon penerima, mekanisme seleksi, dan prosedur pendaftaran memang kami sampaikan hanya kepada TKSK di tiap kecamatan, ini kami lakukan untuk menjaga objektivitas dan menghindari penyalahgunaan informasi, semisal data dimanipulasi agar bisa masuk sebagai penerima atau dijadikan aji mumpung oleh warga. Tapi untuk informasi umum dan dokumentasi program, tetap kami publikasikan secara terbuka di kanal web pemerintahan agar masyarakat tahu bahwa program ini benar-benar berjalan” (Wawancara 18 Februari 2025)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan staf Dinas Sosial yang bertanggung jawab dalam pelaksana Program Berkat Sayang mengungkap bahwa komunikasi memang menjadi komponen penting dalam implementasi Program Berkat Sayang. Menurut beliau, keberhasilan program sangat bergantung pada bagaimana informasi disampaikan dengan jelas, cepat, dan seragam kepada seluruh pelaksana. Pihak Dinsos menyampaikan bahwa sejak awal, program ini menasar kelompok rentan seperti lansia yang terlantar, maka informasi yang disampaikan ke pelaksana di lapangan harus jelas, mereka telah membangun sistem komunikasi yang terstruktur terutama koordinasi aktif dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan). Komunikasi ini dilakukan secara intensif melalui pertemuan sosialisasi lintas kecamatan, dan penyusunan materi sosialisasi, serta pelaporan yang harus dievaluasi. Langkah- langkah ini membantu untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga meminimalisir risiko kesalahan di lapangan.

Gambar 1 menunjukkan kegiatan sosialisasi Program Berkat Sayang yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bersama TKSK pada tahun 2025. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penyampaian informasi

(what) mengenai pelaksanaan program kepada para pelaksana di tingkat kecamatan (who), yang bertempat di lingkungan Kabupaten Sidoarjo (where) dan dilaksanakan pada tahun 2025 (when). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaksana terkait mekanisme program (why), dengan metode penyampaian materi secara langsung melalui pertemuan dan diskusi interaktif (how). Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang seragam sehingga implementasi program dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



Gambar 1 Sosialisasi Berkat Sayang pihak Dinsos Sidoarjo dengan TKSK
Sumber Gambar Oleh Dinas Sosial Sidoarjo

Namun demikian, narasumber juga menjelaskan bahwa tidak semua informasi disebarluaskan kepada publik. Beberapa informasi teknis, seperti kriteria calon penerima, prosedur pendaftaran, dan mekanisme seleksi, hanya disampaikan secara internal kepada TKSK. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk pengendalian risiko untuk mencegah terjadinya manipulasi data atau praktik penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak menerima bantuan. Sebaliknya, untuk menjaga keterbukaan dan transparansi, Dinas Sosial Sidoarjo tetap mempublikasikan informasi umum terkait program ini seperti tujuan, dokumentasi kegiatan, dan dampak positif program di lapangan. Dengan cara ini, masyarakat tetap merasa dilibatkan dan tahu bahwa program ini benar-benar berjalan dan menjangkau kelompok yang tepat. Hal ini sesuai dengan penjelasan wawancara dari salah satu staf Dinsos:

"Yang paling penting itu dua hal: kejelasan dan keterbukaan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Warga itu pintar, kalau mereka merasa dikasih info yang setengah-setengah, mereka bisa kehilangan kepercayaan. Jadi kami selalu tekankan ke pelaksana di lapangan: sampaikan dengan jujur, libatkan warga, dan terima masukan atau aspirasi." (Wawancara 18 Februari 2025)

Selain dari sisi pelaksana, komunikasi juga perlu dilihat dari perspektif penerima manfaat agar lebih utuh. Berikut hasil wawancara dengan salah satu penerima program Berkat Sayang di Kecamatan Tanggulangin:

"Awalnya saya itu ndak paham soal program ini, tapi dulu dari kelurahan ada petugas datang ke rumah saya memberi tahu untuk kumpul di balai desa. Di situ mbak saya dijelaskan rame mbak terus saya termasuk ke dalam penerima karena sudah lansia dan tinggal sendiri. Saya juga diberi tahu jadwal pengiriman dua kali pagi sama sore, jadi saya ndak perlu ke balai desa untuk mengambil karena langsung diantar ke rumah. Katanya kasihan sudah tua masih perlu tenaga untuk mengambil makanan mangkanya diantar saja" (Wawancara 18 September 2025)

Dari keterangan beliau, terlihat bahwa komunikasi program ini tidak hanya berhenti di pihak birokrasi internal, tetapi juga sampai ke kelompok sasaran. Informasi yang jelas dan disampaikan membuat penerima merasa diperhatikan dan tidak kebingungan. Awalnya penerima manfaat Ibu Sumiati tidak paham bagaimana dan apa maksud dari program ini, tetapi petugas kelurahan yang delegasikan oleh pihak Dinsos berupaya datang langsung dan mengajak calon penerima manfaat ke balai desa untuk mendapat penjelasan bersamaan penerima manfaat yang lain.

Untuk memperkuat temuan penelitian ini, dilakukan perbandingan dengan penelitian oleh Shafa Rizqi Nabilah dalam penelitiannya yang berjudul "The Accuracy of 'Berkat Sayang' Aid in Poverty Alleviation in Sidoarjo District"[13]. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Berkat Sayang dalam menjangkau sasaran yang tepat sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang jelas serta koordinasi yang baik antara Dinas Sosial, TKSK, dan pihak desa. Hasil tersebut sejalan dengan temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa komunikasi yang terstruktur, baik antar pelaksana maupun kepada masyarakat, menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan program. Dengan adanya sosialisasi yang intensif dan penyampaian informasi yang jelas, program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Faktanya, dalam praktik implementasi Program Berkat Sayang telah berhasil membangun pola komunikasi yang terstruktur, terutama melalui koordinasi intensif dengan para

stakeholder internal dengan penerima program serta pemanfaatan media digital dalam penyampaian informasi. Hal ini menunjukkan keseriusan Dinas Sosial dalam memastikan bahwa informasi teknis dan prosedural tersampaikan secara tepat kepada pelaksana di lapangan.

Berdasarkan pemaparan dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Berkas Sayang telah sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III [15]. Dalam teorinya, Edwards menjelaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan, selain sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik ditandai dengan penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh semua pihak, terutama kelompok sasaran [23].

Meskipun demikian, komunikasi yang dilakukan tidak sepenuhnya terbuka untuk semua informasi. Informasi yang bersifat teknis, seperti kriteria penerima dan mekanisme seleksi, hanya disampaikan kepada pelaksana program sebagai bentuk pengendalian untuk menjaga keakuratan data dan mencegah penyalahgunaan program. Sementara itu, informasi umum terkait tujuan dan manfaat program tetap disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara keterbukaan informasi dan pengendalian informasi, yang selaras dengan prinsip komunikasi efektif menurut George C. Edwards III, yaitu kejelasan, konsistensi, dan ketepatan dalam penyampaian informasi.

B. Sumber Daya

Menurut Edward III [15]-[24] Sumber daya sangat penting dalam mewujudkan kebijakan. Ada dua jenis sumber daya yang krusial: sumber daya manusia (orang-orang yang melakukan kebijakan) dan sumber daya finansial (dana yang diperlukan). Tanpa keduanya, kebijakan hanya akan menjadi rencana di atas kertas dan sulit untuk dijalankan dengan baik. Jurnal [25] menyebutkan George C. Edward II dalam Subarsono (2005) menegaskan bahwa kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya hanya akan menjadi dokumen tanpa tindakan nyata. Dalam konteks implementasi program Berkas Sayang, hasil wawancara dengan salah satu staf Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menguatkan pandangan tersebut. Ia menyampaikan bahwa:

"Kalau sumber daya digunakan di program Berkas Sayang itu ada dua. Pertama manusia yang terdiri dari Dinas Sosial sebagai koordinator dan pelaksana, Dinas Kesehatan Sidoarjo sebagai dukungan kesehatan yang memberikan informasi menu sehat, lurah dan TKSK di tiap kecamatan untuk validasi data calon penerima manfaat, dan pihak catering di tiap kecamatan. Kedua, finansialnya atau anggaran murni dari APBD Kabupaten Sidoarjo yang memang dialokasikan khusus untuk program ini" (Wawancara 16 April 2025)

"Dalam pelaksanaan Program Berkas Sayang, sumber daya manusia yang terlibat itu cukup beragam, Mbak. Dari internal Dinsos sendiri ada pejabat teknis pelaksanaan program dan membantu pengurusan administratif yang menangani kegiatan yaitu saya sendiri, lalu ada Pak Fatoni selaku kasubbag kepegawaian sebagai penanggung jawab program ini. Sampai penanggung jawab lapangan yang membuat komitmen untuk memastikan bagaimana semua alur proses program ini berjalan yaitu Pak Bashori. Nah, untuk pendistribusian bantuan makanan, kami juga kerja sama dengan pihak ketiga, seperti catering yang bertugas menyediakan suplai ke wilayah tertentu, misalnya di Jabon. Jadi, peran tiap orang jelas sesuai tupoksinya, mulai dari perencanaan, penanggung jawab program, administrasi, sampai penyediaan makanan." (Wawancara 16 April 2025)

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat dipetakan data petugas internal Dinsos dan tupoksinya sebagai berikut:

Tabel 3 Sumber Daya Manusia inti dalam program Berkas Sayang

No.	Nama	Jabatan	Tupoksi
1	Fatoni SE. MM	Kasubbag Kepegawaian Dinas Sosial Sidoarjo	Penanggung Jawab program Berkas Sayang
2	M. Bashori Alwi, S.Sos.M.Ap	Kepala Bidang Limjamsos	Penanggung Jawab Lapangan
3.	Ananda Kharomah R, S.Ikom	Staf Dinas Sosial Sidoarjo	Petugas Pelaksana Kegiatan

Sumber diolah dari Dinas Sosial Sidoarjo (2025)

Dari tabel di atas diketahui Dinas Sosial menjalankan fungsi mulai dari teknis perencanaan, verifikasi data, pengawasan, pelaporan dan tanggung jawab terhadap mekanisme program ini kepada Pemerintahan Kabupaten

Sidoarjo. TSKS bertugas mengusulkan dan mendampingi penerima di tingkat kecamatan, sementara pihak catering bertanggung jawab atas distribusi makanan setiap hari berdasarkan rekomendasi menu bergizi dari Dinas Kesehatan Sidoarjo. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa dari sisi sumber daya manusia, program ini telah didukung oleh aktor-aktor yang kompeten dan memahami peran masing-masing. Koordinasi yang terjalin antara personel menjadi kunci keberhasilan implementasi program di lapangan.

Selain aspek sumber daya manusia, narasumber juga menegaskan bahwa program Berkas Sayang sepenuhnya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo. Ia menyebutkan:

"Kalau soal dana, semuanya murni dari APBD 2022- 2025 Sidoarjo per individu mendapat bantuan sebesar Rp. 15.000 per kotak makanan dan dibagikan dua kali sehari total Rp 30.000. Jadi memang ada alokasi khusus yang diprioritaskan untuk program ini. Karena program ini juga termasuk salah satu dari 17 program prioritas Pemkab Sidoarjo. Mulai dari belanja operasional, distribusi, hingga kerja sama dengan pihak ketiga yaitu catering tanpa dukungan APBD program seperti ini tidak mungkin berjalan"

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan data rekapitulasi dan realisasi anggaran program Berkas Sayang.

Tabel 4 Rekapitulasi dan Realisasi Anggaran Untuk program Berkas Sayang 2022- 2025

No.	program/Kegiatan/Sub Kegiatan	program Prioritas	Sasaran	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	%			
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial/Pengelolaan Data Fakir Miskin	Gratis Makanan Hari Warga Miskin	Lansia	2022	Orang /Hari	730	730	100 %			
					Rp	4.642.8 M	2.645.082 M	56.9 %			
					Rp	7.993.5 M	7.933.08 M	99% %			
					Orang /Hari	800	800	100 %			
					Rp	8.784 M	8.686.200 M	98. %			
					Orang /Hari	800	800	100 %			
					Rp	8.760 M	8.760 M	100 %			

Sumber data diolah dari Dinas Sosial Sidoarjo (2025)

Pada data tabel di atas dan fakta di lapangan ditemukan adanya peningkatan dana untuk sumber daya finansial Berkas Sayang tahun 2025 sebesar 9,59% dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penambahan kuota penerima manfaat program ini berdasarkan usulan dan musyawarah pihak terkait. Dengan alokasi anggaran pada awal peluncurannya tahun September 2022 mencapai Rp 4.642.800.000 untuk 730 penerima. Jumlah anggaran ini meningkat pada tahun 2023 dan 2024 menjadi Rp 7.993.500.000 dengan periode satu tahun anggaran program dan jumlah penerima yang tetap, yaitu 730 orang. Kemudian, pada tahun 2025, alokasi anggaran kembali meningkat menjadi Rp 8.787.400.000 seiring dengan bertambahnya jumlah penerima menjadi 800 orang. Dengan anggaran Rp 30.000 per orang per hari Informasi ini berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kasubbag Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Staf Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Hasil wawancara wawancara peneliti dengan salah satu Staf Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

"adanya peningkatan dana dikarenakan kami menambahkan kuota penerima manfaat dari 730 menjadi 800 penerima berdasarkan usulan para TSKS dan pihak stakeholder yang melihat kondisi para kelompok rentan yang memang masih belum semua dapat kita bantu karena keterbatasan administrasi dan dana" "contohnya keterbatasan administrasi, ada orang tua lansia yang diajukan namun berdasarkan data dari DTSK mereka masih tergolong mampu, dikarenakan para anaknya dinilai masih cukup bisa membiayai para orang tua tersebut, sehingga kami benar- benar cermat memilih yang memang dirasa layak untuk mendapatkan bantuan program ini" (wawancara 14 Februari 2025).

Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara target dan realisasi anggaran pada beberapa tahun, khususnya pada tahun awal pelaksanaan program. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti proses penyesuaian

teknis pada tahap awal implementasi, efisiensi penggunaan anggaran di lapangan, serta adanya perubahan kebutuhan nyata penerima manfaat yang tidak selalu sesuai dengan perencanaan awal. Selain itu, dinamika dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan distribusi, perubahan jumlah hari penyaluran, atau adanya penerima manfaat yang tidak dapat menerima bantuan secara penuh dalam periode tertentu, juga turut mempengaruhi besaran realisasi anggaran.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan alokasi anggaran yang lebih fleksibel agar pelaksanaan program tidak mengalami kekurangan dana di tengah proses berjalan. Apabila terdapat sisa anggaran, dana tersebut dapat dikembalikan ke dalam kas program sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, selisih antara target dan realisasi anggaran tidak selalu menunjukkan adanya permasalahan, melainkan dapat mencerminkan proses penyesuaian dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya finansial program. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dalam Program Berkas Sayang telah dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Memperkuat temuan penelitian ini, dilakukan perbandingan dengan penelitian oleh Shafa Rizqi Nabilah dalam penelitiannya yang berjudul “The Accuracy of ‘Berkas Sayang’ Aid in Poverty Alleviation in Sidoarjo District” [13]. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Berkas Sayang tidak hanya ditentukan oleh ketepatan sasaran, tetapi juga oleh ketersediaan dan pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial. Keterlibatan berbagai aktor seperti Dinas Sosial, TKSK, serta pihak pendukung lainnya, disertai dengan dukungan anggaran yang memadai, menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program.

Hasil tersebut sejalan dengan temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa Program Berkas Sayang telah didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki peran dan tugas yang jelas, serta didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD dan dialokasikan secara khusus. Peningkatan anggaran dari tahun ke tahun juga mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan program ini sebagai prioritas dalam penanganan kelompok rentan.

Berdasarkan temuan tersebut, implementasi Program Berkas Sayang dapat dinilai telah sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III [12], khususnya pada aspek sumber daya. Ketersediaan sumber daya manusia yang terorganisir serta dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program di lapangan. Namun, masih terdapat keterbatasan pada aspek administrasi dan pengelolaan data. Proses verifikasi penerima manfaat yang terkadang berjalan lambat serta kendala dalam validasi data menunjukkan adanya kelemahan dalam sumber daya informasi. Kondisi ini berpotensi menjadi hambatan apabila tidak diimbangi dengan sistem data yang lebih terintegrasi antar instansi.

C. Diposisi

Menurut Edward III yang dikutip Widodo [26]-[27], pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya kemauan, sikap, dan komitmen dari para pelaksana program untuk menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut akan tercapai. Dengan kata lain, meskipun sumber daya manusia dan finansial tersedia, keberhasilan implementasi akan sulit terwujud tanpa adanya niat serta integritas dari para pelaksana di lapangan. Hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait pelaksanaan program Berkas Sayang menunjukkan bahwa aspek diposisi ini cukup kuat, meskipun tidak lepas dari tantangan. Seperti disampaikan oleh Kasubbag Kepegawaian Dinsos Sidoarjo:

“program kan tidak akan berjalan kalau tidak ada komitmen dari tim pelaksana dan bakal jadi rencana saja. Saya selalu tekankan kepada staf bahwa ini bukan sekedar pekerjaan administratif tapi juga bagian dari tanggung jawab moral kita untuk memastikan lansia di Sidoarjo terlindungi. Memang ada tekanan perkaanyang cukup besar, apalagi ketika jumlah penerima kita usahakan meningkat tiap tahun. Tapi karena kita sudah berkomitmen sejak awal, semua proses, termasuk administrasi dan koordinasi dengan kecamatan tetap bisa kami jalankan asalkan konsistensi niat dan koordinasi stakeholder. Jadi semangat pelayan itu harus diutamakan” (wawancara 14 Februari 2025).

Hal serupa juga ditekankan oleh salah satu staf Dinsos:

“Kami selalu berupaya yang terbaik untuk berjalannya program ini, mulai dari proses verifikasi data harus benar-benar akurat, pemilihan menu yang bergizi sesuai arahan dari dinas kesehatan Sidoarjo, pemilihan pihak catering yang berkompeten, mengevaluasi kekurangan tiap taun dan saat ini kami mulai menerapkan aplikasi geotag untuk kurir dalam pelaporan bukti foto penerima manfaat program ini. Dengan geotag kami dapat mengetahui apakah pihak kurir dari catering tepat waktu atau tidak serta tidak bisa dimanipulasi” ” (wawancara 14 Februari 2025).

Penjelasan dari pihak Dinsos tersebut menunjukkan bahwa diposisi para pelaksana program cukup kuat, tidak hanya dalam hal komitmen moral, tetapi juga dalam penerapan inovasi teknis untuk memastikan ketepatan dan akurasi layanan. Artinya implementasi Berkas Sayang tidak hanya bergantung pada niat baik para pelaksana melainkan juga kesungguhan untuk menghadirkan mekanisme kerja yang transparan dan akuntabel. Namun, keberhasilan diposisi ini tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah, melainkan juga pada peran mitra penyedia makanan yang

menjadi aspek krusial dalam mendistribusikan bantuan makanan kepada lansia. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana disposisi dari pihak catering turut berkontribusi dalam menjadi konsistensi kualitas dan ketepatan waktu distribusi, sebagaimana disampaikan oleh salah satu penyedia catering wilayah Kecamatan Tanggulangin:

"Kami dari pihak catering merasa ikut bertanggung jawab menjaga kualitas program ini. Kami selalu memasak menu makanan sehat yang sudah di informasikan dan sesuai standar gizi oleh pihak Dinkes Sidoarjo seperti makanan harus ada proteinnya harus ada buahnya. Tahun ini juga kami juga mengikuti sistem pelaporan baru diterapkan oleh Dinsos dengan Geotag foto yang ada keterangan tanggal waktu. Kalau ada kendala di Lapangan misal cuaca buruk kami mungkin agak sedikit terlambat., yang paling penting adalah sikap ramah dan kesabaran., Intinya, kami ingin program ini benar-benar bermanfaat bagi lansia yang terlantar, bukan asal jalan" (Wawancara 18februari 2025)

Informasi dari narasumber ketiga selaku pihak catering wilayah Kecamatan Tanggulangin menyampaikan bahwa mereka selalu berupaya menjaga kualitas sesuai dengan standar gizi dari Dinas Kesehatan, serta mengikuti sistem pelaporan digital berbasis aplikasi geotag agar waktu dan tempat distribusi lebih transparan. Meskipun terdapat kendala di lapangan seperti cuaca buruk yang membuat pengantaran sedikit terlambat, pihak catering tetap mengedepankan sikap ramah dan kesabaran dalam melayani para lansia terlantar di Sidoarjo selaku penerima manfaat.

Hal tersebut juga dirasakan langsung oleh salah satu penerima program Berkat Sayang, ia menuturkan:

"Kalau soal sikap petugasnya, saya lihat mereka memang niat membantu. Pernah ada makanan terlambat kalau musim hujan tapi kurirnya tetap datang sambil minta maaf. Itu yang membuat saya merasa ada yang memperhatikan, saya ini sudah sepuh mbak. Menunya juga enak ada buahnya. Bagi saya bantuan ini membantu saya yang kadang untuk memasak saja kesusahan" (Wawancara 18 September 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa disposisi tidak hanya dimiliki oleh aparat pemerintah, tetapi juga mitra penyedia makanan atau pihak catering beserta stakeholder yang terkait. Komitmen pihak catering untuk menjaga kualitas makanan, memenuhi standar gizi, memperhatikan kondisi para kelompok rentan dan beradaptasi dengan sistem monitoring berbasis teknologi menunjukkan adanya keselarasan sikap antar Pemerintah Daerah dengan mitra kerja. Temuan ini semakin diperkuat melalui perbandingan dengan penelitian oleh Novia Megasari dan Hendra Sukmana dalam penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan BUMDes dalam Mengembangkan Agrowisata Belimbing Desa Watesari Balongbendo Sidoarjo"[14]. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh disposisi atau sikap pelaksana, seperti komitmen, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam menjalankan program. Pelaksana yang memiliki sikap positif cenderung lebih adaptif terhadap kendala di lapangan serta mampu menjaga keberlanjutan program.

Jika dikaitkan dengan teori George C. Edward III [12], temuan ini menunjukkan bahwa aspek disposisi dalam implementasi program Berkat Sayang sudah berjalan sesuai dengan teori George C. Edward II. Edward menekankan bahwa kemauan, sikap, dan komitmen para pelaksana kebijakan menjadi faktor penentu agar sebuah program dapat mencapai tujuannya[16]. Komitmen tersebut tampak dari upaya mereka yaitu: Penyesuaian menu makanan dengan pedoman gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, proses verifikasi data yang dilakukan secara cermat dan akurat agar bantuan tepat sasaran, pemilihan mitra catering yang profesional dan berkompeten, evaluasi dan inovasi pelaporan berbasis digital dengan menggunakan aplikasi geo-tag sebagai bentuk akuntabilitas distribusi makanan oleh kurir catering. Selain itu, mereka juga berinisiatif mengusulkan penambahan dana dari APBD agar program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Hasil wawancara dan penelitian dari pihak Dinsos maupun pihak catering mengindikasikan bahwa para aktor yang terlibat memiliki integritas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya. Komitmen moral yang ditekankan oleh pejabat struktural, kedisiplinan serta inovasi yang diterapkan staf teknis, hingga tanggung jawab penyedia catering dalam menjaga kualitas dan ketepatan distribusi, semuanya mencerminkan disposisi positif yang selaras dengan teori Edward. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Berkat Sayang tidak hanya didukung oleh sumber daya yang memadai, tetapi juga oleh disposisi yang konsisten, sehingga program ini mampu berjalan efektif dalam melayani kelompok rentan di Sidoarjo.

D. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III [12], struktur birokrasi merupakan mekanisme kerja, prosedur pelaksanaan atau standar operasional kerja, serta hubungan antar unit pelaksana kebijakan yang mendukung dalam berjalannya sebuah program agar lebih efisien dan efektif. Dengan kata lain, birokrasi yang terorganisir dengan baik akan memudahkan koordinasi, mengurangi tumpang tindih tugas dan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Didapatkan Informasi dari Kasubbag Kepegawaian Dinos sebagai berikut:

"Dalam program ini kami jalankan dengan struktur yang sudah jelas. Dinas Sosial sebagai koordinator utama, kemudian ada Dinas Kesehatan Sidoarjo yang memberi arahan terkait standar gizi, sementara pihak TSKS kecamatan dan kelurahan berperan dalam validasi data penerima. Untuk di lapangan kami dibantu

TKSK sebagai pelaporan program dan pihak catering dalam mendistribusikan ke penerima manfaat. Jadi setiap unit sudah punya peran masing-masing. Dan ini yang menjaga program ini tetap berjalan sesuai alurnya” (wawancara 14 April 2025) ”

”Prosedur pelaksanaan atau mekanisme ya Dinsos berperan sebagai koordinator utama mulai dari pendataan, validasi penerima, hingga pengawasan kualitas program. Setelah data penerima ditetapkan, pengadaan makanan dilakukan melalui pihak ketiga yang dipilih dengan sistem tender. Penerima manfaat akan memperoleh dua kali makanan sehat per hari, masing-masing senilai Rp 15.000 dengan jadwal distribusi pagi pukul 07-10-00 dan sore pukul 15.00-17.00. Proses pelaporan distribusinya menggunakan sistem digital berbasis geotag hasil dari evaluasi sebelumnya, sehingga setiap pengantaran tercatat melalui GPS, waktu, dan dokumentasi foto sebagai bukti realisasi. Nah dalam menjaga mutu makanan, kami bekerja sama dengan Dinkes itu tadi agar sesi standar gizi” (Wawancara 14 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, terlihat bahwa struktur birokrasi dan mekanisme pelaksanaan program Berkat sayang sudah tertata dengan jelas. Dinsos berperan sebagai koordinator utama yang mengelola keseluruhan proses, mulai dari pendataan, validasi penerima, hingga pengawasan kualitas program. Dukungan lintas instansi juga tampak, misalnya Dinkes yang memberikan arahan mengenai menu yang sesuai standar gizi, keterlibatan TKSK di tingkat kecamatan dan kelurahan yang berperan penting dalam verifikasi serta pelaporan.

Sementara itu, proses pelaksanaan program berlangsung secara sistematis dan berjenjang, dari level desa hingga kabupaten dengan keterlibatan aktif berbagai aktor. Pihak catering yang dipilih melalui sistem tender bertanggung jawab atas distribusi makanan ke lokasi penerima manfaat dengan jadwal yang teratur yakni pagi pukul 07.00-10.00 dan sore pukul 15.00-17.00 dengan alokasi dana Rp 15.000 untuk satu kotak makanan. Proses distribusi juga memanfaatkan sistem digital berbasis geotag. Sedangkan untuk Standar Operasional Prosedur program Berkat Sayang beliau menjelaskan:

”Dalam pelaksanaan program Berkat Sayang ini kami juga berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan. Pertama, pemerintah desa atau kelurahan mengusulkan data calon penerima bantuan per makanan. Setelah itu, data tersebut kami verifikasi dan validasi dengan TKSK di lapangan apakah benar kondisi calon penerima sesuai dengan yang diajukan ke kami. Ketika data sudah fix, penerima bantuan kemudian ditetapkan dengan daftar penerima lainnya dalam Keputusan Bupati sebagai dasar hukum yang kongkret. Selanjutnya, distribusi data disalurkan kepada pihak-pihak catering pemenang tender dan TKSK di kecamatan. Setelah pihak catering dan TKSK mendapatkan informasi mengenai siapa aja yang panas mendapatkan bantuan makanan di wilayah mereka, baru mereka mulai mendistribusikan sesuai arahan menu sehat dari dinkes dan sistem pelaporan kepada kami” (Wawancara 14 April 2025)

Hasil dari wawancara tersebut dapat dipetakan bahwa SOP program Berkat Sayang sebagai berikut.

Tabel 5 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan program Berkat Sayang

Tahapan	Kegiatan	Waktu Penyelesaian
Tahapan 1	Pemerintah Desa/Kelurahan mengusulkan data penerima bantuan per makanan bagi warga miskin	7 Hari
Tahapan 2	Data penerima manfaat yang diusulkan oleh Kecamatan, dilakukan verifikasi dan validasi data oleh pelaksana Dinas Sosial dan TKSK	10 Hari
Tahapan 3	Penerima bantuan per makanan bagi warga miskin/lansia ditetapkan dalam Keputusan Bupati	7 Hari
Tahapan 4	Bantuan makanan bagi warga miskin disalurkan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Dinas Sosial dengan menu yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan	Satu tahun selama proses penyaluran berlangsung

Sumber diolah dari Dinas Sosial Sidoarjo (2025)

Tabel 6 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Berkat Sayang

No.	Aspek	Petunjuk Teknis
1	Penentuan Penerima Manfaat	Berdasarkan usulan desa/kelurahan dan diverifikasi oleh TKSK serta Dinas Sosial
2	Penetapan Penerima Manfaat	Daftar penerima yang telah diverifikasi oleh pihak Dinas Sosial Sidoarjo akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagai dasar hukum
3	Penyedia Makanan	Dipilih melalui sistem tender oleh Dinas Sosial
4	Standar Makanan	Mengacu pada pedoman gizi dari Dinas Kesehatan
5	Jadwal Distribusi	Dilakukan 2 kali sehari (pagi 07.00–10.00 dan sore 15.00–17.00)
6	Anggaran	Rp15.000 per kotak makanan (Rp30.000 per hari per penerima)
7	Sistem Pelaporan	Menggunakan sistem digital berbasis geotag (foto, waktu, dan lokasi)
8	Pengawasan	Dilakukan oleh Dinas Sosial bersama TKSK secara berkala

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5, dapat diketahui bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Program Berkat Sayang telah disusun secara sistematis dan terintegrasi melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) serta petunjuk teknis pelaksanaan yang jelas. Alur pelaksanaan program dimulai dari proses pengusulan data oleh pemerintah desa atau kelurahan, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial bersama TKSK untuk memastikan ketepatan sasaran. Selanjutnya, data penerima yang telah dinyatakan valid ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagai dasar hukum yang sah. Selain itu, aspek teknis pelaksanaan juga diatur secara rinci, mulai dari mekanisme pemilihan penyedia makanan melalui sistem tender, penentuan standar gizi oleh Dinas Kesehatan, hingga jadwal distribusi yang dilakukan dua kali sehari. Penggunaan sistem pelaporan berbasis geotag menjadi bentuk inovasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena memungkinkan pemantauan distribusi secara real time.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Novia Megasari dan Hendra Sukmana yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang jelas, pembagian tugas yang terorganisir, serta prosedur yang terstandar menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur yang tertata memungkinkan koordinasi antar pelaksana berjalan lebih efektif serta meminimalisir potensi kesalahan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Dalam aspek pelaksanaan, distribusi makanan dilakukan oleh penyedia catering resmi yang dipilih melalui mekanisme tender. Menu yang diberikan sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan, sehingga tidak hanya menekankan pada jumlah, tetapi juga pada kualitas gizi yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Dengan demikian, SOP ini memastikan adanya pembagian tugas yang jelas, dasar hukum yang kuat, serta standar kualitas yang terukur. Namun dibalik keberhasilan tersebut, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam aspek fleksibilitas birokrasi, khususnya dalam proses pergantian data penerima manfaat. Ketika ditemukan bahwa penerima telah meninggal dunia, proses penggantian nama tidak dapat dilakukan secara cepat karena harus melalui mekanisme pengusulan ulang dan menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati pada tahun anggaran berikutnya. Surat dari desa atau kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk mengganti penerima secara langsung, sehingga respons terhadap dinamika sosial menjadi lambat.

Hal ini dikuatkan melalui pernyataan dari staf Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, yang menyampaikan:

“Mungkin yang menjadi kekurangan kami saat ini dikarenakan kurang efisiennya dalam pergantian nama calon penerima bantuan program Berkat Sayang jika ditemukan bahwa penerima sebelumnya telah meninggal dunia. Harus menunggu diajukan terlebih dahulu dan menunggu surat keputusan bupati di tahun depan” (Wawancara 14 April 2025)

Namun demikian, di balik keberhasilan tersebut, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam aspek fleksibilitas birokrasi, khususnya dalam proses pergantian data penerima manfaat. Ketika ditemukan bahwa penerima telah meninggal dunia, proses penggantian nama tidak dapat dilakukan secara cepat karena harus melalui mekanisme pengusulan ulang dan menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati pada tahun anggaran berikutnya. Surat dari desa atau kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk mengganti penerima secara langsung, sehingga respons terhadap dinamika sosial menjadi cenderung lambat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan staf Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang menyampaikan bahwa proses pergantian penerima masih belum efisien karena harus menunggu penetapan resmi melalui SK Bupati pada periode berikutnya.

Temuan di lapangan tersebut jika dikaitkan dengan teori George C. Edwards III [12], menunjukkan bahwa secara keseluruhan struktur birokrasi, prosedur pelaksanaan, dan standar operasional yang dijalankan telah sesuai dengan konsep implementasi kebijakan. Hal ini terlihat dari struktur organisasi yang jelas, prosedur pelaksanaan yang sistematis, pembagian peran yang terdefinisi antar unit, serta adanya dukungan teknologi yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat kendala birokratis yang dapat menghambat

kelancaran implementasi di tingkat lapangan, khususnya dalam aspek fleksibilitas dan respons terhadap perubahan data penerima manfaat. Dalam kerangka teori Edwards III [16], kondisi ini menunjukkan bahwa struktur yang terlalu kaku dan prosedural berpotensi menghambat efektivitas implementasi kebijakan apabila tidak diimbangi dengan fleksibilitas administratif yang adaptif terhadap dinamika di lapangan.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Berkat Sayang untuk kelompok rentan di Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa program ini memiliki potensi untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, khususnya lansia miskin. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III [12] yang meliputi empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pertama, komunikasi dalam program ini berlangsung melalui penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan terstruktur melalui koordinasi lintas pihak, pemanfaatan media digital, serta sosialisasi langsung kepada penerima program. Baik pelaksana maupun penerima manfaat dapat memahami informasi yang disampaikan, meskipun masih diperlukan penguatan literasi digital bagi pelaksana teknis agar pemanfaatan aplikasi geotag lebih optimal dan meminimalisir kesalahan dalam pelaporan, serta membuka ruang komunikasi dua arah yang lebih luas, misalnya melalui forum warga atau pengaduan resmi jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam program. Kedua, sumber daya dalam program ini melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun mitra eksternal, yang menunjukkan adanya kolaborasi dalam pelaksanaan program. Dukungan sumber daya manusia dan finansial menjadi faktor penting, meskipun masih terdapat kendala dalam aspek administrasi dan validitas data yang dapat mempengaruhi proses verifikasi penerima manfaat. Ketiga, disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen dan sikap positif dari para pelaksana program, yang tercermin melalui upaya menjaga kualitas makanan serta pengusulan penambahan dana. Hal ini mengindikasikan adanya kemauan pelaksana dalam menjalankan program sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan kebijakan. Keempat, struktur birokrasi dalam program ini ditandai dengan adanya pembagian peran yang jelas antar pelaksana. Namun demikian, terdapat kendala teknis dalam proses pergantian nama penerima bantuan yang dapat mempengaruhi responsivitas program. Prosedur yang bersifat administratif dalam penggantian data penerima memerlukan perhatian agar lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rahmat, berkah, dan tuntunan dari Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat tetap berada di jalan-Nya serta diberi kekuatan untuk tidak berputus asa dalam menjalani setiap proses penelitian ini sebagai tugas akhir perkuliahan. Di tengah berbagai keraguan dan kelelahan, penulis percaya bahwa selalu ada pertolongan dan kemudahan yang menyertai setiap langkah. Kedua, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, Ayah dan Ibu. Meskipun keluarga kami tidak lagi utuh dan kehangatan tidak selalu terasa dalam setiap pelukan, penulis meyakini bahwa di antara jarak dan keadaan tersebut, selalu terselip doa-doa tulus yang mengiringi setiap perjuangan. Dukungan, baik yang terlihat maupun yang tidak terucap, menjadi kekuatan yang tidak tergantikan dalam perjalanan ini. Ketiga, penulis juga ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang mungkin tidak selalu pandai mengungkapkan perasaan dan beban yang dirasakan, tetapi tetap memilih untuk bertahan, melangkah, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena tidak menyerah di saat lelah, karena tetap percaya meskipun langkah terasa berat. Semoga pencapaian ini menjadi bukti bahwa segala proses, air mata, dan usaha tidak pernah sia-sia. Keempat, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bripda M. Rizky E. P., S.H., yang selalu hadir dalam suka maupun duka. Atas cinta, pengertian, kesabaran, dan dukungan yang diberikan, penulis merasa tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Kehadirannya menjadi penguat di saat rapuh dan bagian penting dalam perjalanan ini. Kelima, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kuliah, yaitu Diva, Risa, Yiyin, Vira, Kasih, dan Novia, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, dan perjuangan selama masa perkuliahan. Kebersamaan yang terjalin tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan akademik, tetapi juga menjadi kenangan berharga yang akan selalu diingat.

REFERENSI

- [1] G. M. Djabumir, H. V. R. Pattimukay, and J. Theresia, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Keluarga Miskin di Kota Ambon," vol. 2, 2025.
- [2] S. Humaedi, B. Wibowo, and S. T. Raharjo, "Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)," *Share Soc. Work J.*, vol. 10, no. 1, pp. 61–72, 2020.
- [3] V. F. Mustofa, B. Prasetyo, D. Indriani, and N. A. Rahmawati, "Manajemen Gizi Mikro dan Dampak Kesehatan pada Lansia," *Amerta Nutr.*, vol. 7, no. 1, pp. 37–46, 2023, doi: 10.20473/amnt.v7i1SP.2023.36-45.
- [4] A. Sarjito, "Free Nutritious Meal Program as a Human Resource Development Strategy to Support National Defense Program Makan Bergizi Gratis sebagai Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pertahanan Negara," vol. 5, no. 5, pp. 129–141, 2024.
- [5] Tim Hukumonline, "Tanggung Jawab Negara dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945," *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-34-ayat-1-uud-1945-lt6576a413aa746/> (accessed Feb. 18, 2025).
- [6] *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. 2009. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- [7] *Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia*. 2012. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130208/permensos-no-19-tahun-2012>
- [8] *Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia*. 2018. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129964/permensos-no-5-tahun-2018>
- [9] P. Sidoarjo, "Perda Sidoarjo No 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026," 2021.
- [10] S. D. Waluyo, M. A. Publik, U. E. Unggul, E. Politik, and M. B. Gratis, "Kebijakan Makanan Gratis : Tinjauan Ekonomi," vol. 12, pp. 144–151, 2025.
- [11] N. Team, "Gizi pada Lansia: Cara Mendapatkan Nutrisi Terbaik dan Seimbang," *Nestlé Health Science*, 2024. <https://www.nestlehealthscience.co.id/artikel/panduan-tips-gizi-lansia> (accessed Feb. 19, 2025).
- [12] S. Nikmah and T. Rahaju, "Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Surabaya," *Publika*, vol. 9, no. 3, pp. 195–210, 2021, doi: 10.26740/publika.v9n3.p195-210.
- [13] S. R. Nabilah, M. Jacky, S. Harianto, and A. Suprijono, "The Accuracy of " Berkat Sayang " Aid in Poverty Alleviation in Sidoarjo District Social Studies Education , Universitas Negeri Surabaya," vol. 14, no. 2, pp. 365–374, 2024.
- [14] N. Megasari and H. Sukmana, "Implementation of Bumdes Policy in Developing Agrotourism in Watesari Balongbendo Village , Sidoarjo Belimbing [Implementasi Kebijakan Bumdes Dalam Mengembangkan Agrowisata Belimbing Desa Watesari Balongbendo Sidoarjo]," pp. 1–8, 2023.
- [15] G. C. Edward III, *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980. [Online]. Available: https://openlibrary.org/books/OL4108847M/Implementing_public_policy
- [16] T. Turhindayani, "Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)," *ABIS Account. Bus. Inf. Syst. J.*, vol. 4, no. 4, 2020, doi: 10.22146/abis.v4i4.59322.
- [17] S. Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D," *Alf. Bandung*, vol. 14, 2010.
- [18] D. Firmansyah, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian : Literature Review General Sampling Techniques in Research Methodology : Literature Review," vol. 1, no. 2, pp. 85–114, 2022.
- [19] Ardiansyah, Risnita, and M. S. Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *J. IHSAN J. Pendidik. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2023, doi: 10.61104/ihsan.v1i2.57.
- [20] Q. Qomaruddin and H. Sa'diyah, "Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *J. Manag. Accounting, Adm.*, vol. 1, no. 2, pp. 77–84, 2024.
- [21] J. H. Posumah, "Implementasi Kebijakan Dalam Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tompas Baru Kabupaten Minahasa Selatan," vol. IX, no. 3, pp. 339–350, 2023.
- [22] A. Hildayanti, A. Parawangi, and R. Rasdiana, "Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa," *Kaji. Ilm. Mhs. Adm. Publik*, vol. 3, no. 6, pp. 1673–1686, 2022.
- [23] H. A. Posangi, F. Lengkong, and S. Dengo, "Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow," *J. Adm. Publik*, vol. 6, no. 94, 2020.

- [24] A. Setiawan, M. F. F. Sahlan, and S. Syam, "Evaluasi Implementasi E-Government Kota Palopo Menggunakan E-Government Maturity Model," *J. Softw. Eng. Multimed.*, vol. 1, no. 2, pp. 59–66, 2023, doi: 10.20895/jasmed.v1i2.1345.
- [25] R. P. Laras Rahmawati¹, Tina Cahya Mulyatin², "Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kb) Menuju Terwujudnya Keluarga Berkualitas," vol. 9, no. 1, pp. 18–28, 2025.
- [26] S. A. T. 1, R. Gosal², and V. Kasenda³, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna," vol. 2, no. 2, pp. 1–14, 2022, [Online]. Available: <file:///C:/Users/HP/Downloads/alfonkimbal,+Susanti+Takaluhude.pdf>
- [27] J. Widodo, *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.